

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Diakses 27 Maret 2016. <http://bpk.go.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Kotawaringin Barat dalam Angka In Figures*. Diakses 20 Maret 2016 <http://kobarkab.bps.go.id>.
- Bastian I. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks. California.
- Cui. 2004. *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 15, No. 1, Halaman 34-47
- Dwiningsih, S. 2006. *Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Tesis. UGM Yogyakarta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Stanford. Connecticut.
- Government Accounting Standards Board. 1994. *Concept Statement No.2 related to Service Efforts and Accomplishments Reporting*.
- Governmental Accounting Standard Boards. 1999. *Original Pronouncements: Governmental Accounting and Financial Reporting Standard*.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanafi, M. dan Halim, A. 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, (UPP) STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hennink, M. H. I dan Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*, Sage Publications Ltd, London.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- International Public Sector Accounting Standards Board. 2007. *International Public Sector Accounting Standard 1 Presentation of Financial*. Issued January 2007.

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 05/SK/IX/HMS/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.

Manan, B. 1999. *Good Governance Hindarkan Rakyat dari Tindakan Negara Yang Merugikan*, Jurnal Transparansi, Edisi 14 Tahun 1999.

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No.1, Mei 2006, Hal 1 – 17.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset. Yogyakarta.

Martiningsih. R.S.P. 2008. *Analisis kebutuhan informasi pemerintahan: Studi pelaporan keuangan pemerintahan*. Tesis . UGM Yogyakarta.

Otjeno. 2014. *Community Perspectives on Accountability and Transparency in The Management of Local Authority Transfer Fund in Kenya*. Global Journal of Business Research.

Paulsson. G. 2006. *Accrual Accounting In The Public Sector: Experiences From The Central Government In Sweden*. Financial Accountability & Management.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. *Tingkatkan Akuntabilitas dengan LAKIP*. Diakses 4 Februari 2016. <http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id/?p=2584>

Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Steccolini, I. 2002. *Local Government Annual Report: An Accountability Medium? Eiasm Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reform*, Dublin September 2002. <http://www.cergas.info>.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Sujana, E. 2001. *Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis. UGM Yogyakarta

Sukirman. 2009. *Persepsi Stakeholder Sekolah terhadap Tingkat Kepentingan Penyajian Laporan Keuangan*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 1, No. 2, Halaman 86-98.

Suwardjono, 2008. *Teori Akuntansi Perekrayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Tayib, M. 1999. *Financial Reporting by Malaysian Local Authorities A Study of The Needs and Requirements of The Users of Local Authority Financial Accounts*. The International Journal of Public Sector Management. 103.21

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wang, X. 2001. *Assessing Public Participation in U.S. Cities*. Public Performance & Management Review. Vol. 24, No. 4. (Jun., 2001), pp. 322-336.

Wisniewski, M. 2004. *Performance Measurement for Stakeholders : The Case of Scottish Local Authorities*. International Journal of Public Management. Vol 17. No. 3 (2004). pp. 222-233.

Yuliari, G. P. A. 2003. *Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif Mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah*. Tesis. UGM. Yogyakarta.